

DAFTAR ISI

ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Studi Pustaka	7
1.7 Kerangka Konseptual	15
1.7.1 Sekuritisasi: Diskursus dan Estetika Populisme	15
1.8 Metode Penelitian.....	24
1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
1.8.2 Batasan Penelitian	25
1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa	26
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.8.5 Teknik Analisis Data.....	28
1.9 Sistematika Penulisan.....	29
BAB 2 SEJARAH HUBUNGAN UNI EROPA DAN HONGARIA	31
2.1 Masa sebelum EU <i>accession</i> 2004	31
2.1.1 <i>Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy</i> (PHARE) tahun 1989.....	31
2.1.2 Hongaria mendaftar sebagai negara kandidat Uni Eropa tahun 1994 ..	34
2.2 Hongaria sebagai negara anggota Uni Eropa 2004 – 2010	37
2.3 Hongaria pada masa pemerintahan Viktor Orban 2010 – 2023 (sekarang)	41
2.3.1 Kepemimpinan Viktor Orban dan awal kemunduran demokrasi Hongaria.....	41
2.3.2 Hongaria dan Uni Eropa pada saat <i>European Migrant Crisis</i> 2015.....	49
2.3.3 Tahun 2018 Uni Eropa mengaktifkan Article 7 Perjanjian Lisbon	57
2.3.4 Hongaria dan Uni Eropa pada masa Pandemi Covid-19	58

2.3.5 Hubungan Hongaria dan Uni Eropa saat Perang Russia dan Ukraina..	61
2.3.5 Hubungan Hongaria dan Uni Eropa dan <i>Conditionality Mechanism</i> ...	64
BAB III RETORIKA POPULIS SAYAP-KANAN HONGARIA DAN SENTIMEN ANTI-UNI EROPA.....	76
3.1 Retorika populis sayap-kanan Hongaria terhadap demokrasi liberal (<i>Rule of Law</i>) Uni Eropa	76
3.1.1 “The Motherland is Not for Sale!”	76
3.1.2 “To Govern They Can’t, To Face the Electorate They Won’t”	78
3.1.3 “We Won’t Let Brussels Dictate Us!”	81
3.2 Retorika populis sayap-kanan Hongaria terhadap <i>Conditionality Mechanism</i> Uni Eropa	83
3.2.1 “Brussels has attacked Hungary”.....	83
3.2.2 “Brussels Making Mistake by Dancing to Hungarian Leftists’ Whistle”	86
3.2.3 Hongaria blackmail Uni Eropa sebagai bentuk protes terhadap <i>Conditionality Mechanism</i>	88
3.2.4 “74% of Hungarians Reject the Withholding EU Funds”	90
BAB IV ANALISIS SEKURITISASI HONGARIA TERHADAP KEBIJAKAN CONDITIONALITY MECHANISM UNI EROPA.....	97
4.1 Pemerintahan Hongaria Sebagai Populis Sayap-Kanan	97
4.2 Karakteristik Diskursus dan Estetika Sekuritisasi Populis Sayap-Kanan Hongaria	101
4.2.1 <i>Anti-elite</i>	102
4.2.2 <i>Political Outsider as a Securizing Actor</i>	105
4.2.3 <i>Agential Audience</i>	107
4.2.4 <i>The Homogenous People as a Referent Object</i>	108
4.2.5 <i>Identification Between the Actor and the Audience</i>	109
4.3 Tahapan Sekuritisasi Hongaria Terhadap <i>Conditionality Mechanism</i>	111
4.3.1 Tahap Kemunculan Isu (<i>Existential Threat</i>).....	111
4.3.2 Tahap Meyakinkan Audiens	120
BAB V PENUTUP.....	134
5.1 Kesimpulan.....	134
5.2 Saran	135
Daftar Pustaka.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Statistik Perbandingan Pengungsi yang Datang ke Eropa Melalui Jalur Laut (Tahun 2014 – 2015).....	50
Gambar 2. 2 Peta Jalur Kedatangan Pengungsi Pada Krisis Pengungsi Eropa 2015	52
Gambar 2. 3 Papan Reklame yang Bertuliskan “We Shall Not Let Soros Have the Last Laugh”	56
Gambar 2. 4 Kampanye penolakan sanksi Uni Eropa dalam bahasa Hongaria jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “Sanksi Brussels Merusak Ekonomi Kita!”	64
Gambar 2. 5 Surel dari Rektor University of Pecs Sebagai Klarifikasi Pihak Universitas Terhadap Isu yang Beredar Mengenai Nasib Mahasiswa Erasmus ...	72
Gambar 3. 1 Sebanyak 60% dari 1000 Orang Dewasa di Hongaria Merasa Uni Eropa Tidak Memiliki Hak dalam Mencampuri Internal Negara Anggota”	92
Gambar 3. 2 Survei Szazadveg “Pendapat Masyarakat Hongaria Mengenai Conditionality Mechanism”	93
Gambar 3. 3 Survei Szazadveg “Pendapat Masyarakat Hongaria Mengenai Sikap Brussels yang Dianggap Double Standard”	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai-nilai demokrasi dan *rule of law* menjadi pedoman utama dalam segala kebijakan dan perkembangan Uni Eropa, yang mana tertulis dalam Pasal 2 The Treaty of European Union (TEU)¹ dan juga dalam *Copenhagen Criteria*. Berbagai pencapaian Uni Eropa dalam menjaga perdamaian, kesejahteraan ekonomi, dan menjaga stabilitas kawasan selama puluhan tahun dapat dicapai dengan menerapkan nilai demokrasi dan *rule of law* sebagai tiang utama, yang mana digambarkan oleh European Commission dalam lima prinsip dasar *good governance*, yaitu; *openness, participation, accountability, effectiveness*, dan *coherence*². Namun apa yang terjadi dalam satu dekade terakhir menjadi sebuah pukulan keras bagi Uni Eropa, di mana terdapat serangkaian kemunduran demokrasi di beberapa negara Visegrád, seperti yang terjadi di Hongaria dengan kemunculan Viktor Orbán sebagai Perdana Menteri di tahun 2010³.

Pada tahun 2014, Viktor Orbán melalui pidatonya menyatakan perubahan sistem negaranya menjadi demokrasi illiberal, dan terinspirasi dari negara seperti Singapura, Turki, Tiongkok, dan Russia yang dianggap lebih mampu bersaing dalam dunia internasional⁴. Pemerintahan Viktor Orban

¹ Rhona Smith, "Consolidated Version of the Treaty on European Union," *Core EU Legislation* (2015): 1–14.

² European Commission, *European Governance A White Paper*, n.d.

³ Jan Werner Müller, "Defending Democracy within the EU," *Journal of Democracy* 24, no. 2 (2013): 138–149.

⁴ Viktor Orbán and -Csaba Tóth, "Full Text of Viktor Orbán's Speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 Juli 2014," *The Budapest Beacon*, Terakhir diubah 2014, diakses pada Februari 25, 2023, <https://budapestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-Juli-2014/%0Ahttp://files/3167/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-Juli-2014.html>.

meninggalkan nilai demokrasi liberal karena merasa bahwa tidak cocok dengan Hongaria yang berlandaskan pada nilai konservatisme, nasionalisme dan kekeluargaan. Pemerintahan Viktor Orban menilai bahwa demokrasi liberal, dengan berbagai prinsip di dalamnya, cenderung menjadi ancaman eksistensial bagi keamanan identitas dan kepentingan nasional Hongaria.

Orban dalam pidatonya menilai bahwa sistem demokrasi liberal membawa banyak masalah dan gagal memenuhi kepentingan nasional Hongaria, dimana Orban menyinggung beberapa peristiwa seperti krisis finansial 2008 yang hampir membuat Hongaria mengalami *bankruptcy*, masalah krisis imigran di Eropa, gagasan *woke culture* seperti LGBTQI dan kesenjangan sosial dalam sistem ekonomi kapitalisme⁵. Dengan menggunakan narasi sekuritisasi terhadap isu-isu tersebut, Orban dan Partai Fidesz mampu menarik hati masyarakat Hongaria dan membuktikan bahwa nilai liberal perlu ditinggalkan⁶. Reformasi terhadap konstitusi, badan yudisial, dan beberapa sistem pemerintahan liberal di Hongaria pun dapat dijalankan tanpa adanya hambatan⁷.

Studi mengenai keamanan atau sekuriti telah bergeser sejak kemunculan kelompok *Copenhagen School*, dimana Barry Buzan, Waever, dan Wilde mengajukan ide perluasan mengenai konsep ancaman, yang sebelumnya hanya terfokus pada militer menjadi ke beberapa sektor seperti politik, sosial,

⁵ Viktor Orbán and -Csaba Tóth, "Full Text of Viktor Orbán's Speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 Juli 2014,".

⁶ Győző Gyöngyösi and Emil Verner, "Financial Crisis, Creditor-Debtor Conflict, and Populism," *Journal of Finance* 77, no. 4 (August 1, 2022): 2471–2523, accessed April 30, 2023, <https://news.mit.edu/2022/hungary-debt-crisis-populist-0616>.

⁷ Kriszta Kovács and Kim Lane Scheppele, "The Fragility of an Independent Judiciary: Lessons from Hungary and Poland—and the European Union," *Communist and Post-Communist Studies* 51, no. 3 (2018): 189–200.

lingkungan, dan lainnya⁸. Rasa insecurities bagi sebuah negara tidak lagi secara eksklusif dibentuk oleh variabel yang objektif seperti kekuatan militer, namun insecurities dapat diproduksi secara subjektif dengan adanya proses securitization melalui *speech act* oleh *securitizing actor*, yang mana dalam hal ini adalah Viktor Orban dan Partai Fidesz⁹. Viktor Orban dan partai Fidesz sebagai kelompok populis melihat bahwa identitas Hongaria dan kepentingan nasional Hongaria terancam dengan nilai-nilai dan sistem demokrasi liberal, hal ini lah yang menjadi *existential threat* yang dicoba diatasi oleh Orban dengan perpindahan sistem demokrasi liberal menjadi illiberal.

Perubahan sistem demokrasi di Hongaria dapat terjadi sebagai akibat dari minimnya kerangka sanksi yang efektif di Uni Eropa¹⁰. Jan-Werner Muller mengatakan bahwa satu-satunya kerangka kebijakan yang dimiliki Uni Eropa hanyalah Pasal 7 dari Perjanjian Lisbon¹¹ yang akhirnya hanya dijadikan sebagai opsi nuklir¹² atau pilihan akhir yang tidak efektif karena membutuhkan kesepakatan secara *unanimity* atau persetujuan dari seluruh *member state*¹³. Akhirnya Pasal 7 sulit digapai karena adanya faktor kedekatan politik antara Hongaria dan Polandia yang saling bahu-membahu melakukan veto disaat terdapat keputusan yang akan merugikan salah satu pihak¹⁴.

⁸ Holger Stritzel, "Securitization Theory and the Copenhagen School," in *New Security Challenges*, 2014, 11–37, https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137307576_2.

⁹ Bohdana Kurylo, "The Discourse and Aesthetics of Populism as Securitisation Style," *International Relations* 36, no. 1 (2022): 127–147.

¹⁰ Müller, "Defending Democracy within the EU." 142.

¹¹ Pasal 7 Perjanjian Lisbon menyatakan bahwa negara yang secara jelas melanggar nilai-nilai dasar Uni Eropa (yang tertulis pada Pasal 2 TEU), maka hak keanggotaan negara tersebut akan ditangguhkan.

¹² Pasal 7 Perjanjian Lisbon dianggap sebagai opsi nuklir karena sanksinya yang cukup berat, yaitu penangguhan hak keanggotaan di dalam kawasan.

¹³ Müller, "Defending Democracy within the EU." 146

¹⁴ Christophe Hillion, "Compromising (On) the General Conditionality Mechanism and the Rule of Law," *SSRN Electronic Journal*, no. Desember (2021): 1–13.

Untuk menutupi ketidakmampuan Uni Eropa dalam melindungi *rule of law* pada tanggal 16 Desember 2020, Uni Eropa membentuk sebuah mekanisme baru yang bernama *a general regime for the protection of the EU budget* yang lebih dikenal luas dengan sebutan *Conditionality Mechanism*¹⁵. Melalui *Conditionality Mechanism*, Uni Eropa dapat menangguhkan hak finansial atas EU budget negara anggota yang terbukti melanggar seperangkat aturan yang tertera dalam *rule of law* Uni Eropa¹⁶. Anggaran yang akan ditangguhkan berasal dari anggaran pembangunan kawasan yang terdapat dalam Union Budget. Dalam proposal implementasi *Conditionality Mechanism* terhadap Hongaria yang diadopsi tanggal 19 September 2022, European Commission meminta Hongaria untuk melakukan reformasi terhadap beberapa hukum nasional mereka yang dirangkum ke dalam 17 *measures*, di dalamnya termasuk tuntutan untuk membentuk badan anti korupsi, transparansi atas pengadaan publik, pemilihan tender, alur alokasi manajemen keuangan kawasan terhadap yayasan publik, dan lainnya¹⁷.

Setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 12 Desember 2022 telah ditetapkan penangguhan hak Hongaria atas anggaran kawasan sebesar 6,3 miliar Euro¹⁸. Berdasarkan *assessment* yang dijalankan oleh Hungarian

¹⁵ European Commission, "Rule of Law Conditionality Regulation | European Commission," diakses pada Oktober 4, 2022, https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_en#relatedlinks.

¹⁶ European Commission, "Rule of Law Conditionality Regulation | European Commission,"

¹⁷ European Commission, *Proposal for a Council Implementing Decision on Measures for the Protection of the Union Budget against Breaches of the Principles of the Rule of Law in Hungary*, European Commission, vol. 0295 (Brussel, 2022), <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12551-2022-INIT/en/pdf>.

¹⁸ European Commission, "Rule of Law Conditionality Mechanism: Council Decides to Suspend €6.3 Billion given Only Partial Remedial Action by Hungary - Consilium," Terakhir diubah Desember 12, 2022, diakses pada Februari 18, 2023, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/rule-of-law-conditionality-mechanism/>.

Helsinki Committee, hal ini terjadi karena Hongaria tidak sepenuhnya mematuhi 17 *measures* tersebut dan hanya mencapai kategori *implemented but with deficiencies*¹⁹. Penangguhan tersebut tentu saja merugikan masyarakat Hongaria karena dana yang ditangguhkan termasuk dana anggaran beasiswa Erasmus, dana pembangunan, dan lainnya yang dibutuhkan oleh Hongaria. Namun setelah anggaran ditangguhkan, Hongaria justru menunjukkan sikap enggan untuk mematuhi persyaratan dan melakukan perlawanan seperti *blackmail* dengan melakukan veto terhadap beberapa kebijakan Uni Eropa, membangun diskursus anti Brussel, mengancam tindakan Brussel yang menangguhkan anggaran Erasmus melalui *Conditionality Mechanism*, dan lainnya²⁰.

Hal ini menjadikan isu ini menarik untuk diteliti, karena Hongaria sebagai *member state* dengan kekuatan ekonomi dan politik yang kecil, secara terang-terangan melanggar *Copenhagen Criteria* Uni Eropa, menganggap nilai demokrasi liberal sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas Hongaria, dan menolak untuk mematuhi *Conditionality Mechanism* dibalik ancaman penangguhan hak finansial kawasan. Maka perlu dianalisa kembali bagaimana Orban dan partai Fidesz melakukan sekuritisasi terhadap *Conditionality Mechanism* Uni Eropa.

1.2 Rumusan Masalah

Hongaria, sebagai negara anggota dengan kekuatan ekonomi dan politik

¹⁹ Hungarian Helsinki Committee, K-Monitor, and Transparency International, *Compliance with Key Implementation Steps of the Remedial Measures as Committed to by Hungary in the Framework of the Conditionality Mechanism 1*, 2022.

²⁰ Euronews, "Hungary Ready to Sue EU over Cuts to Erasmus Funding | Euronews," last modified January 12, 2023, accessed April 26, 2023, <https://www.euronews.com/my-europe/2023/01/12/hungary-ready-to-sue-eu-over-cuts-to-erasmus-funding>.

yang kecil, berani melanggar *rule of law* Uni Eropa serta menerapkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Meskipun telah mendapatkan sanksi penangguhan hak finansial atas anggaran kawasan sebesar 6,3 Miliar Euro yang merugikan masyarakatnya, namun Hongaria tetap teguh pada keputusannya untuk meninggalkan nilai demokrasi liberal yang dianggap mengancam keamanan identitas dan kepentingan nasionalnya. Pola yang dilakukan oleh Viktor Orban dan Partai Fidesz dalam memperlakukan demokrasi liberal dan *Conditionality Mechanism* serupa dengan pola sekuritisasi, sehingga perlu dianalisa kembali seperti apakah bentuk sekuritisasi yang dijalankan oleh pemerintahan populis sayap-kanan Hongaria.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana karakteristik sekuritisasi Hongaria terhadap *Conditionality Mechanism* Uni Eropa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan *Conditionality Mechanism* serta untuk mengamati secara mendalam bagaimana bentuk sekuritisasi yang dijalankan oleh pemerintah populis Hongaria terhadap *Conditionality Mechanism*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini menawarkan perihal pengetahuan mengenai *Conditionality Mechanism* sebagai alat baru bagi European Commission untuk menjalankan kewajibannya sebagai *the Guardian of the Treaties*.

2. Secara akademis penelitian ini menawarkan perihal pengetahuan mengenai kemunduran demokrasi di kawasan Eropa, khususnya di negara Hongaria.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait karakteristik tahapan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah populis sayap-kanan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai referensi utama. Studi pustaka pertama mengambil referensi dari artikel jurnal yang berjudul *Defending Democracy Within the EU* yang ditulis oleh Jan-Werner Muller. Artikel ini berisikan sebuah penelitian teoritis mengenai masalah utama yang dihadapi Uni Eropa di masa sekarang. Terdapat beberapa kemunduran demokrasi pada negara anggota Uni Eropa dan European Commission sebagai *the guardian of the treaties* tidak mampu mengatasi hal tersebut dengan baik, dan salah satu contoh kemunduran tersebut adalah kebangkitan Viktor Orbán Hal ini terjadi karena menurut Muller, Uni Eropa kekurangan sebuah mekanisme untuk mendisiplinkan negara anggotanya²¹, dan juga terdapat berbagai dilema mengenai legitimasi Uni Eropa untuk menerapkan sanksi kepada negara anggota, karena sanksi cenderung tidak bersifat demokratis dan cenderung *paternalystic*.

Hasil yang ditemukan adalah disebutkan bahwa Uni Eropa masih kurang mampu dalam mengatasi kemunduran demokrasi di wilayahnya. Meskipun

²¹ Müller, "Defending Democracy within the EU." 146

dilema telah diatasi dan Uni Eropa secara penuh memiliki legitimasi untuk menerapkan sanksi, namun mekanisme sanksi yang sudah ada sebelumnya tidak cukup untuk mengatasi kemunduran demokrasi di Uni Eropa. Article 7 dari Perjanjian Lisbon yang dianggap sebagai opsi nuklir atau sanksi terberat ternyata tidak cukup efektif karena membutuhkan kesepakatan secara *unanimity* atau persetujuan dari seluruh negara anggota untuk menerapkan sanksi tersebut.

Menurut Muller Uni Eropa memerlukan mekanisme baru yang dapat memberikan teguran yang lebih keras dari sekedar kata-kata, namun lebih lembut dari Article 7 dari perjanjian Lisbon, untuk menyatakan bahwa kemunduran demokrasi tidak bisa ditoleransi²². Selain itu Muller juga mengajukan pembentukan badan baru untuk membantu Uni Eropa sebagai *watchdog* yang bertanggung jawab untuk memberikan keputusan politik mengenai pelanggaran *rule of law*. Tulisan dalam artikel ini menjadi landasan penelitian yang ingin peneliti bawa, di mana peneliti ingin mencoba menganalisa apakah *Conditionality Mechanism* dapat menjadi mekanisme sanksi yang cukup efektif untuk memenuhi kekurangan dari Uni Eropa tersebut dalam mengatasi *democratic backsliding* di kawasannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas dilema yang disampaikan pada artikel jurnal yang ditulis oleh Muller.

Studi pustaka kedua diambil dari artikel jurnal berjudul *A Community of Values: Democratic Identity Formation in the European Union* yang ditulis oleh Odelia Oshri, Tamir Sheafer, dan Shaul R Shenhav. Artikel jurnal ini meneliti mengenai bagaimana bentuk ‘*common identity*’ dari negara-negara

²² Müller, 148.

Eropa, serta relasi antara durasi tergabungnya sebuah negara dalam Uni Eropa berbanding lurus dengan proses persebaran dari nilai demokrasi ke masyarakat di negara tersebut²³.

Hasil yang ditemukan adalah terdapat dua pandangan berbeda dari para ahli mengenai *common shared values* dari Uni Eropa. Beberapa kelompok ahli menyebutkan bahwa Uni Eropa tidak memiliki *shared values* atau identitas bersama, dan beberapa ahli lain menyatakan sebaliknya. Artikel ini menemukan bahwa perbedaan pandangan tersebut terjadi karena perbedaan pemahaman pada konsep identitas²⁴. Dibalik adanya ciri khas bahasa dan budaya dari setiap negara anggota Uni Eropa, dapat ditemukan bukti empiris bahwa nilai demokrasi menjadi identitas bersama dari seluruh negara Uni Eropa, yang mana hal ini dideklarasikan secara jelas oleh Uni Eropa melalui *Declaration on European Identity* 14 Desember 1973 di Copenhagen, di mana dinyatakan bahwa *European identity* dibentuk dari prinsip *representative democracy, social justice, ultimate goal of economic progress* dan menghormati HAM²⁵. Temuan ini membantu peneliti dalam memahami bahwa pada dasarnya demokrasi menjadi identitas bersama negara-negara Uni Eropa, sehingga jika merujuk kepada deklarasi tersebut, Uni Eropa memiliki legitimasi untuk mempertahankan demokrasi di wilayahnya, yaitu melalui berbagai institusi dan instrumen kebijakan di mana salah satunya adalah sanksi²⁶.

²³ Odellia Oshri, Tamir Sheaffer, and Shaul R. Shenhav, "A Community of Values: Democratic Identity Formation in the European Union," *European Union Politics* 17, no. 1 (2016): 114–137.

²⁴ Oshri, Sheaffer, and Shenhav, 116.

²⁵ European Commission, "Declaration on European Identity," *Bulletin of the European Communities*, no. 12 (1973): 118–122, http://www.cvce.eu/obj/declaration_on_european_identity_copenhagen_14_December_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html.

²⁶ Oshri, Sheaffer, and Shenhav.

Studi pustaka ketiga merupakan sebuah artikel jurnal yang berjudul *Why Do Anti-Corruption Laws Fail in Central Eastern Europe? A Target Compliance Perspective* yang ditulis oleh Agnes Batory. Artikel ini mencoba menganalisa sebab-sebab mengapa kasus korupsi tetap bertahan di negara-negara Central Eastern Europe (CEE) dibalik adanya *Anti Corruption Measures* yang secara aktif dijalankan oleh negara-negara tersebut dalam dua dekade terakhir sejak proses demokratisasi di tahun 1990-an pasca keruntuhan Uni Soviet dan pada saat proses bergabung dengan Uni Eropa di tahun 2004 – 2007. Artikel ini menggunakan Hongaria sebagai contoh kasus yang dianggap relevan untuk menggambarkan kasus korupsi dan kemunduran kepatuhan pada negara-negara anggota Uni Eropa di wilayah CEE.

Temuan yang didapatkan dari artikel ini adalah negara-negara CEE dalam proses demokratisasi dan penerapan hukum anti korupsi hanya memiliki fokus jangka pendek saja dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengatasi korupsi di negara mereka, yang mana hanya bertujuan untuk memuaskan ekspektasi European Commission dan menjadi jalan bagi negara-negara tersebut bergabung dengan Uni Eropa²⁷. Hal ini memungkinkan terjadi karena pada dasarnya kepatuhan dan implementasi merupakan dua konsep yang jauh berbeda. Menurut buku karya Tanja A. Borzel yang berjudul *Why Noncompliance: The Politics of Law in the European Union*, dapat ditemukan bahwa kepatuhan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan implementasi, di mana implementasi hanya terbatas kepada penerapan praktis suatu norma dan hukum internasional ke dalam aturan nasional, sementara kepatuhan berfokus

²⁷ Agnes Batory, “Why Do Anti-Corruption Laws Fail in Central Eastern Europe? A Target Compliance Perspective,” *Regulation and Governance* 6, no. 1 (2012): 66–82.

pada perubahan sikap dan perilaku yang secara konsisten. Artikel ini menemukan bahwa negara-negara CEE hanya berhasil ke tahap implementasi saja, belum sampai ke tahap kepatuhan. Pada contoh kasus negara Hongaria, artikel ini menemukan bahwa Hongaria sudah memiliki kerangka *penalties* atas tindakan korupsi yang baik dengan mencakupi enam belas jenis pelanggaran dan hukuman penjara hingga sepuluh tahun, namun tidak memiliki kerangka hukum atau institusi dalam monitoring dan deteksi yang cukup baik²⁸. Artikel jurnal ini membantu peneliti untuk memahami bahwa kemunduran demokrasi dan pelanggaran rule of law Uni Eropa di Hongaria sangat memungkinkan terjadi karena terlalu banyak celah yang terbentuk saat proses demokratisasi negara CEE saat bergabung ke Uni Eropa. Artikel jurnal ini juga membantu memberikan gambaran bahwa Uni Eropa tidak cukup untuk mendorong negara anggota atau calon negara anggota untuk mengimplementasi *rule of law* saja, namun juga perlu untuk mencapai tingkat kepatuhan agar *democratic backsliding* dapat dihindari.

Studi pustaka keempat merujuk kepada artikel jurnal yang berjudul *The Fragility of Independent Judiciary: Lessons from Hungary and Poland-and the European Union* yang ditulis oleh Kriszta Kovacs dan Kim Lane Scheppele. Artikel jurnal ini membahas mengenai reformasi badan yudisial yang dianggap sebagai kunci utama dari kemunduran demokrasi di Hongaria dan Polandia. Artikel jurnal ini berfokus dalam menjabarkan fenomena proses runtuhnya kebebasan badan yudisial di Hongaria dan Polandia, kemudian menganalisa apa saja langkah yang telah diambil oleh Uni Eropa untuk mengatasinya, serta

²⁸ Batory, 72.

faktor-faktor mengapa fenomena kemunduran demokrasi ini belum berhasil diatasi.

Pada artikel jurnal ini ditemukan bahwa pada dasarnya, Uni Eropa sudah memastikan nilai demokrasi liberal dalam *aquis communautaire* telah diterapkan dengan baik kepada 10 negara anggota kawasan baru di masa *EU big-bang accession* 2004 terjadi, sehingga jelas bahwa 10 negara anggota yang baru bergabung tersebut mematuhi dan menanamkan *rule of law* kepada hukum nasional mereka dengan baik. Namun tidak ada yang pernah menyangka, baik para ahli maupun politisi di tingkat EU, bahwa kemunduran demokrasi dapat terjadi meskipun kematangan demokrasi telah berhasil dicapai²⁹. Hal ini disebabkan oleh Uni Eropa yang hanya mementingkan kepatuhan *rule of law* negara anggota di masa enlargement saja, tidak ada monitoring lebih lanjut ketika telah menjadi anggota tetap, sehingga ketika pintu keanggotaan telah terbuka, negara-negara CEE yang telah bergabung ke dalam kawasan dengan mudah dapat melakukan reformasi sistem pemerintahan nasional mereka, seperti apa yang dilakukan Fidesz Hongaria dan PiS Polandia dalam melemahkan badan yudisial dan mahkamah konstitusi mereka. Artikel jurnal ini menyatakan bahwa kemunduran demokrasi sangat berbahaya bagi Uni Eropa, karena tidak hanya melanggar dari apa yang dicita-citakan dalam TEU saja, namun dengan adanya pelemahan kredibilitas dari badan yudisial dan mahkamah konstitusi di suatu negara anggota, maka European Commission akan sulit untuk memantau apakah regulasi dan direktif yang dibentuk telah diterapkan oleh negara anggota dengan baik atau tidak, karena badan-badan

²⁹ Kovács and Scheppele, "The Fragility of an Independent Judiciary: Lessons from Hungary and Poland—and the European Union."

tersebut menjadi perpanjangan tangan bagi Uni Eropa.

Uni Eropa telah mencoba berbagai hal untuk mengatasi permasalahan sistemik ini, termasuk di dalamnya mengandalkan Article 7 dan menggunakan mekanisme infringement dengan membawa Hongaria kepada European Court of Justice (ECJ). Meskipun ECJ selalu menemukan bahwa Hongaria terbukti melanggar TEU dan harus membayar biaya kompensasi, namun Hongaria terus memenangkan situasi di lapangan dengan memastikan posisi badan konstitusi dan yudisial tersebut diisi dengan orang-orang terdekat dari partai Fidesz. Salah satu tindakan paling agresif yang pernah diambil oleh European Commission untuk mengatasi masalah ini pada saat Hongaria mencoba menyingkirkan beberapa hakim yang tidak sesuai dengan pemerintahan dengan menurunkan rentang usia pensiun bagi para hakim di badan konstitusi dan yudisial Hongaria³⁰. Namun Uni Eropa tidak mampu mengatasi hal ini dengan baik dan keadaan yang sama terus berlanjut hingga delapan tahun lamanya.

Studi pustaka kelima diambil dari artikel jurnal yang berjudul *The Analysis of the Hungarian Government's Discourse towards the Migrant Crisis: A Combination of Securitization and Euroscepticism* yang ditulis oleh Onder Canveren dan Fulya Akgul Durakcay. Artikel ini mencoba memahami pandangan dan kebijakan Hongaria terhadap krisis pengungsi eropa dengan menganalisa discourse pemerintahan Hongaria yang tertuang dalam pidato Viktor Orbán, pidato perwakilan pemerintahan, dan lebih dari 160 dokumen resmi pemerintah Hongaria. Canveren dan Durakcay menggunakan konsep sekuritisasi dan *euroscepticism* yang merupakan konsep turunan dari

³⁰ Kriszta Kovács and Kim Lane Scheppele.

konstruktisme untuk memahami pandangan pemerintahan Hongaria terhadap isu tersebut.

Pada artikel jurnal ini ditemukan bahwa partai Fidesz dan pemerintah Hongaria yang memiliki aliran konservatis nasionalis sangat memandang para imigran sebagai ancaman besar bagi Hongaria, baik itu ancaman nasional, ekonomi, budaya, dan keamanan internal³¹. Berbagai retorika xenophobia digunakan oleh pemerintah Viktor Orbán untuk melakukan *framing* terhadap para pengungsi seperti sebutan terorisme, ilegal, bahaya, ancaman, dan sebagainya. Orbán dalam pidato 31 Agustus 2016 juga mengatakan bahwa terdapat peningkatan aksi terorisme dan *semi-war* di Eropa sejak adanya arus tak terkontrol dari ribuan imigran ilegal. Discourse tersebut digunakan Viktor Orbán sebagai alat sekuritisasi isu imigran, yang kemudian untuk mendapatkan legitimasi atas kebijakan pemerintah.

Artikel jurnal ini juga menemukan bahwa discourse anti-Uni Eropa atau *eurocepticism* dari pemerintah Hongaria mendapatkan momentum utamanya pasca peristiwa krisis pengungsi tersebut. Hal ini terjadi ketika Uni Eropa membentuk kebijakan EU Migration Quotas yang mana mewajibkan seluruh negara anggota Uni Eropa untuk menampung sejumlah pengungsi dan memenuhi berbagai hak mereka selama singgah. Viktor Orbán menilai kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang anti-demokratis dan sangat tidak berlandaskan hukum. Orbán menilai bahwa kebijakan Uni Eropa tidak menyelesaikan masalah, tidak menghargai kedaulatan negara anggota, dan

³¹ Fulya Akg and Onder Canveren, "The Analysis of the Hungarian Government ' s Discourse towards the Migrant Crisis : A Combination of Securitization and Eurocepticism," *Yonetim Ve Ekonomi* 3 (2017).

justru membiarkan ancaman nasional datang ke Hongaria untuk memperburuk keadaan. Dalam pidatonya pada tanggal 4 Oktober 2016, Orbán menyatakan bahwa Brussel seharusnya lebih mendengarkan opini publik, bahwa solusi terbaik adalah membiarkan masyarakat Hongaria untuk menentukan siapa yang dapat tinggal di wilayah teritori negaranya, bukan Brussel yang dapat menentukan hal tersebut.

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk memahami kasus pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan konsep turunan dari teori sekuritisasi *Copenhagen School* oleh seorang ahli bernama Bohdana Kurylo. Kurylo dalam artikel jurnalnya yang berjudul *The Discourse and Aesthetics of Populism as Securitization Style* mencoba menghubungkan konsep sekuritisasi dan pemerintahan populis sayap kanan, dan menemukan bahwa sekuritisasi yang dijalankan oleh partai sayap kanan berbeda dengan bentuk tahapan sekuritisasi tradisional yang ditemukan oleh kelompok *Copenhagen School*.

1.7.1 Sekuritisasi: Diskursus dan Estetika Populisme

Sebelum membahas mengenai gaya sekuritisasi populis oleh Bohdana Kurylo, peneliti akan menjelaskan lebih dahulu seperti apa bentuk sekuritisasi tradisional yang ditemukan oleh kelompok *Copenhagen School* yang terdiri dari Barry Buzan, Waever, dan Wilde. Kelompok *Copenhagen School* memperluas sektor keamanan yang awalnya hanya berfokus pada militer, dengan menambahkan wilayah kajian seperti; *political sector*, *economic sector*, *societal sector*, dan *environmental sector*³². Sektor keamanan yang akan menjadi fokus

³² Buzan, hal 22-23.

kajian dari penelitian ini adalah sektor sosial, yang mana berkaitan dengan identitas negara, sistem pemerintahan, dan *way of life* negara Hongaria yang terancam oleh nilai-nilai liberal³³. Dalam hal ini kita bisa merujuk kepada pidato Viktor Orbán pada tahun 2014, Viktor Orbán menyatakan bahwa Uni Eropa dengan berbagai kebijakan dan paham liberal telah melampaui batasan, sehingga keputusan Uni Eropa seperti kebijakan kuota penerimaan imigran, memberikan hak kepada kelompok LGBTQI, dirasa mengancam kedaulatan Hongaria dalam mempertahankan identitas budaya, nilai keluarga, dan ideologi konservatifnya³⁴.

Sekuritisasi merupakan proses mengarahkan sebuah isu sehingga melebihi aturan main yang ada dan dapat dikategorikan sebagai isu ‘spesial’ atau isu yang melampaui isu politik. Berlandaskan hal tersebut, sekuritisasi juga bisa digambarkan sebagai versi radikal dari politisasi³⁵. Buzan, Waever dan Wilde menyatakan bahwa secara teori semua isu publik dapat dialokasikan ke dalam sebuah spektrum yang terbentang dari kategori *non-politicized*, *politicized*, dan *securitized*. Kategori pertama, isu *non-politicized*, merupakan isu yang dianggap tidak membutuhkan tanggapan pemerintah sehingga tidak termasuk ke dalam diskusi publik dan pengambilan keputusan. Kategori kedua, isu *politicized*, merupakan isu yang dianggap berkaitan dengan kebijakan publik yang membutuhkan tanggapan pemerintah dalam bentuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan proses pemerintahan lainnya. Kategori ketiga yaitu isu *securitized*, merupakan isu yang dianggap sebagai ancaman atau

³³ Buzan, hal 22-23.

³⁴ Orbán and Tóth, “Full Text of Viktor Orbán’s Speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 2014.”

³⁵ Buzan, Waever, and Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, vol. 93, hal 23-24.

existential threat, yang mana membutuhkan langkah darurat dan memperbolehkan rangkaian aksi di luar aturan main dan prosedur politik yang ada. Proses membawa sebuah isu menuju spektrum ketiga melalui berbagai langkah retorika, diskursus, dan pemberian simbol merupakan apa yang dapat dipahami sebagai sekuritisasi tersebut.

Menurut Buzan, proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil ketika *audience*, atau dalam hal ini merupakan masyarakat negara yang memberikan legitimasi kepada pemerintahnya, menerima gagasan bahwa suatu isu dikategorikan sebagai *existential threat* yang mengancam dan perlu diatasi. Namun perlu dipahami bahwa proses penerimaan *existential threat* oleh *audience* tersebut tidak harus melalui proses yang demokratis tanpa dominasi dan paksaan. Jika proses sekuritisasi hanya terbatas kepada aksi dari *securitizing actors* dalam menggagaskan isu tersebut sebagai *existential threat*, maka hal ini belum didefinisikan sebagai sekuritisasi dan baru disebut sebagai proses *securitizing move*³⁶. *Securitizing move* dilakukan dalam bentuk *speech act*, yaitu sebuah aksi penggagasan isu sebagai ancaman dengan mengandalkan *power of language* seperti pemberian simbol, retorika, dan diskursus. Sekuritisasi dapat dikonsepsikan sebagai interaksi intersubjektif antara *securitizing actors* dengan *relevant audience* dalam bentuk *speech act event*³⁷. Sekuritisasi berjalan melalui tiga tahapan berikut sebagai efek dari relasi antar unit³⁸, yaitu:

- 1) Pemunculan isu (*existential threats*)

³⁶ Buzan, hal 25.

³⁷ Thierry Balzacq, Sarah Léonard, and Jan Ruzicka, "'Securitization' Revisited: Theory and Cases," *International Relations* 30, no. 4 (2016): 494–531.

³⁸ Buzan, Waever, and Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, vol. 93, hal 26.

2) Langkah darurat (*Emergency actions*)

3) *Breaking free of rules*

Berdasarkan pandangan dari Buzan, Waever, Wilde, dan juga Balzacq, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat empat unit yang dapat dianalisa untuk menggambarkan proses sekuritisasi dari pendekatan *speech act*, yang pertama adalah *referent object* atau unit yang mendapatkan ancaman dari *existential threat* dan memiliki legitimasi untuk bertahan atau *survive*. Kedua *securitizing actor*, yaitu individu atau kelompok yang menjalankan pendekatan *speech act*. Biasanya peran dari *securitizing actor* diisi oleh pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, dan kelompok kepentingan. Ketiga adalah *functional actor* atau *referent subject*, yaitu entitas yang keberadaannya memberikan ancaman bagi *referent object*³⁹. Keempat atau yang terakhir adalah *audience*, yaitu unit yang menjadi target dari *securitizing actor* untuk mendapatkan legitimasi dalam pengambilan keputusan atau *emergency measures* untuk mengatasi *existential threat*.

Jonna Nyman menyatakan bahwa dalam *Copenhagen School*, keberhasilan dari sekuritisasi sangat berpaku pada penerimaan dari *relevant audience* terhadap *speech act* yang dijalankan. *Relevant audience* adalah kelompok yang dianggap terancam oleh *existential threat*, sehingga mereka lah yang dapat memutuskan untuk menerima atau menolak gagasan mengenai *existential threat* yang dibentuk oleh aktor sekuritisasi. Ketika *relevant audience* sudah menerima gagasan tersebut, maka sekuritisasi dinyatakan berhasil, keberhasilan tersebut dapat memberikan legitimasi bagi aktor

³⁹ Balzacq, Léonard, and Ruzicka, “‘Securitization’ Revisited: Theory and Cases.”

sekuritisasi untuk mengambil *extraordinary act* meskipun tidak harus dilakukan⁴⁰.

Sekuritisasi secara koheren melekat pada gaya politik populisme, hal ini dapat dilihat pada definisi utama populisme yang berkaitan dengan ‘entitas elit’ yang dianggap merugikan *the people* atau rakyat sebagai *referent object*. Moffit menjelaskan bahwa populisme dapat didefinisikan sebagai gaya politik yang disimbolisasikan dengan dua fitur utama, yang pertama yaitu klaim atas hak untuk berbicara dan bertindak atas nama masyarakat dimana pemerintah populis sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri, dan kedua yaitu konstruksi antagonistik yang membagi antara *pure people* sebagai kelompok baik dan *corrupt elite* sebagai musuh utama⁴¹. Weyland secara serupa menggambarkan populisme sebagai strategi politik yang berlandaskan pada retorika anti-elit dan sumpah janji seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya dari musuh yang berbahaya⁴².

Meskipun populisme berkaitan erat dengan sekuritisasi sebagai ‘alat’ utama dalam gaya politiknya, Kurylo menemukan bahwa tahapan sekuritisasi yang dijalankan oleh partai populis sayap-kanan berbeda dengan sekuritisasi tradisional. Menurut Kurylo, populisme memainkan diskursus dan retorika dalam tahapan *securitizing act* secara *poor taste* jika dilihat dari estetika pemilihan kata, simbol, dan pemaknaan. Para populis cenderung menggunakan kalimat atau retorika yang vulgar, gamblang, terbuka, *simple-minded*, dan apa adanya dibandingkan dengan apa yang biasanya ada dalam sekuritisasi

⁴⁰ Jonna Nyman, “Securitization,” in *Security Studies: An Introduction*, ed. Paul D Williams and Matt McDonald, 3rd ed. (New York: Routledge, 2019), 356.

⁴¹ Kurylo, “The Discourse and Aesthetics of Populism as Securitisation Style.”

⁴² Kurylo, hal 129.

tradisional⁴³. Misalnya seperti Viktor Orban yang menggambarkan imigran Muslim sebagai *invaders* atau *terrorist* yang berbahaya bagi masyarakat Kristiani Hongaria⁴⁴, memberikan label pedofil kepada kelompok LGBTQI yang berbahaya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Hongaria, menggambarkan sanksi Uni Eropa ke Russia dengan gambar rudal nuklir sebagai simbol yang merusak, membangun retorika anti-brussel dengan kampanye *'let's stop Brussels!'* dan lainnya⁴⁵. Penggambaran yang gamblang tersebut yang membuat kelompok populis sebagai *securitizing actor* yang menarik bagi masyarakat, karena penggunaan retorika yang menunjukkan amarah dan emosi tersebut menggambarkan seorang pemimpin selayaknya masyarakat awam biasa yang memperjuangkan suaranya, sehingga meletakkan para populis pada posisi yang setara, dapat digapai dan diandalkan oleh masyarakat⁴⁶. Dibandingkan menggunakan simbolisasi 'superhero' yang rasional, berkelas, dan sempurna, populis menggunakan simbolisasi 'rakyat biasa' sebagai figur pemimpin yang terbuka dan apa adanya.

Berdasarkan hal tersebut, Kurylo berpendapat bahwa sekuritisasi populisme mampu menutupi kekurangan yang dimiliki oleh sekuritisasi tradisional dalam menghubungkan *securitizing actor* dengan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat. Sekuritisasi tradisional belum mampu memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara membuktikan apakah masyarakat sebagai

⁴³ Kurylo, hal 129.

⁴⁴ Rebecca Staudenmaier, "Orban to Germany: 'You Wanted the Migrants, We Didn't' – DW – 01/08/2018," last modified August 1, 2018, accessed April 28, 2023, <https://www.dw.com/en/hungarys-orban-tells-germany-you-wanted-the-migrants-we-didnt/a-42065012>.

⁴⁵ Robert Csehi and Edit Zgut, "'We Won't Let Brussels Dictate Us': Eurosceptic Populism in Hungary and Poland," *European Politics and Society* 22, no. 1 (2021): 53–68, <https://doi.org/10.1080/23745118.2020.1717064>.

⁴⁶ Kurylo, "The Discourse and Aesthetics of Populism as Securitisation Style."

audience setuju dengan keputusan yang diambil oleh *securitizing actor*. Kurylo melihat bahwa populis mampu mengisi kekosongan tersebut dengan memainkan retorika *the endangered people*, sebagai gambaran atau identitas bahwa masyarakat rentan akan ancaman dan kelompok populis hadir untuk mengambil langkah pencegahan.

Untuk menggambarkan perbedaan antara tahapan sekuritisasi tradisional dengan gaya sekuritisasi populis, Kurylo mengajukan lima karakteristik kunci dari diskursus sekuritisasi populisme, yaitu:

1) *Anti-Elite*

Teori sekuritisasi tradisional berfokus pada pidato para aktor yang secara terinstitusional memiliki legitimasi untuk berbicara dan mendesain apa itu keamanan. Secara kontras, sekuritisasi populisme cenderung memainkan retorika keamanan yang anti-elit, dimana aktor seperti organisasi internasional, *policymaker*, birokrat, justru dihubungkan dengan kelompok yang digambarkan sebagai ancaman bagi masyarakat seperti imigran, *asylum seekers*, kelompok LGBT, dan lainnya. Contohnya seperti bagaimana Viktor Orban dan partai Fidesz menggambarkan Uni Eropa sebagai entitas yang memaksa Hongaria untuk menerima kuota imigran Muslim ke negaranya, mendorong Hongaria untuk memberikan hak kelompok LGBT, dan memaksa Hongaria untuk merubah *way of life* Hongaria dengan *Conditionality Mechanism*.

2) *Political Outsider as a Securitizing Actor*

Berbeda dengan sekuritisasi tradisional yang mana dalam melihat

securitizing actor berfokus pada *state representative* seperti presiden, kementerian, *expert*, dan lainnya, sekuritisasi populisme cenderung memisahkan *securitizing actor* mereka dari para elit negara. Hal ini dilakukan agar memberikan simbol bahwa para populis berbeda dengan elit negara dan merupakan salah satu bagian dari masyarakat, sehingga mereka membawa ‘*the will*’ atau keinginan dan suara dari rakyat itu sendiri.

Selain menggambar diri mereka sebagai salah satu dari masyarakat, citra para pemimpin populis secara langsung juga menunjukkan personal yang berjiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Wodak menjelaskan hal ini sebagai *double-positioning* dari pemimpin populis yang menjadi representatif masyarakat dan juga penyelamat bagi masyarakat. Dalam kasus ini, kita dapat melihat Viktor Orban yang memberikan label dirinya sebagai *freedom fighters* bagi kedaulatan Hongaria dalam berbagai pidato dan wawancara yang ia hadiri⁴⁷.

3) *Agential Audience*

Berbeda dengan sekuritisasi tradisional, sekuritisasi populisme cenderung membagi variabel *audience* menjadi dua, yaitu *audience* primer dan sekunder. *Audience* primer adalah masyarakat yang dianggap sebagai *the pure people*, sementara *audience* sekunder adalah kategori yang lebih besar di mana di dalamnya termasuk media massa, politisi, aktor transnasional, dan lainnya. *Audience* sekunder digunakan

⁴⁷ Gabriela Baczynska, “INTERVIEW-Hungary’s Orban Rejects Criticism over Rule of Law, Says He Is a ‘Freedom Fighter’ | Reuters,” last modified September 26, 2020, accessed April 28, 2023, <https://www.reuters.com/article/hungary-orban-idINL5N2GM3VT>.

oleh populis sebagai aktor yang melakukan diseminasi atau penyebaran informasi dari *speech act* yang dijalankan, mereka tidak harus menerima dan setuju dengan *speech act* yang diberikan, karena hanya dimanfaatkan sebagai penyebar informasi.

Dengan membagi variabel *audience* menjadi dua kategori, maka para populis dapat memfokuskan *audience* primer sebagai *referent object* yang utama dan meningkatkan status mereka sebagai *the ultimate referent object*, sehingga dalam menangani ‘perjuangan’ rakyat, retorika populis mampu menyerupai apa yang digambarkan dalam *Critical Security Studies* (CSS) sebagai perolehan kembali keamanan bagi kelompok masyarakat *the voiceless, the unrepresented, dan the powerless*. Kelompok tersebut menjadi target *audience* terbaik yang dapat memberikan dukungan moral dan legitimasi terhadap *securitizing move*.

4) *The Homogenous People as a Referent Object*

Fitur lain dari sekuritisasi populisme adalah identitas homogen dari *referent object*. Populasi suatu negara terdiri dari berbagai kelompok golongan masyarakat. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah ‘siapakah yang secara moral berhak dikategorikan sebagai *the people*?’. Dalam studi yang dilakukan oleh Gray dan Franck, *the people* dapat didefinisikan seperti penggambaran seorang perempuan yang suci namun rentan terhadap ancaman. Seperti kelompok *white working-class* yang dirugikan oleh *migrant workers* dalam kasus Brexit. Di Hongaria sendiri yang menjadi *homogenous people* adalah warga negara asli Hongaria yang menganut agama Kristen dan nilai kekeluargaan yang

kuat, sehingga menolak keras nilai-nilai demokrasi liberal yang melindungi keberadaan imigran Muslim dan kelompok LGBT.

5) *Identification Between the Actor and the Audience*

Seperti yang peneliti jelaskan di atas, teori sekuritisasi tradisional tidak mampu menjelaskan mengenai relasi antara aktor sekuritisasi dan *audience*. Sekuritisasi populisme mampu mengisi gap tersebut yang mana sekuritisasi populis mengedepankan *closeness to the people*, dibandingkan sekuritisasi tradisional yang memberikan jarak antara aktor sekuritisasi yang *knowledgeable* dengan masyarakat yang awam. Populis mampu memainkan retorika yang menggambarkan potret seorang rakyat, sehingga tidak ada halangan atau pembatas antara aktor dan *audience*.

Peneliti melihat bahwa konsep sekuritisasi populisme yang diajukan oleh Bohdana Kurylo ini sangat cocok untuk menggambarkan sekuritisasi yang Viktor Orban jalankan terhadap demokrasi liberal dan *Conditionality Mechanism* Uni Eropa. Lima karakteristik kunci dari diskursus sekuritisasi populisme Bohdana Kurylo sangat cocok dengan retorika yang dijalankan oleh Viktor Orban dan partai Fidesz sebagai *speech act*, sehingga konsep ini akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mengolah data penelitian serta memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sendiri merujuk kepada teknik analisis data yang

bergantung pada data non-numerik, yang mana berfokus pada makna (*meanings*) dan pemahaman (*understandings*) daripada kuantifikasi⁴⁸.

Untuk jenis penelitian, penelitian ini akan menggunakan jenis deskriptif analisis, yang mana penelitian ini akan menjabarkan fenomena yang sedang dikaji melalui analisa data berupa kebijakan, perilaku, dan respon suatu aktor dalam bentuk retorika *speech act* seperti pidato, pernyataan resmi, interview, dan lainnya. Tujuan dari penggunaan jenis deskriptif analisis pada penelitian ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami penerapan *Conditionality Mechanism* Uni Eropa dan alasan ketidakpatuhan Hongaria terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat faktor-faktor non-material yang menjadi sumber ketidakpatuhan Hongaria, sehingga penelitian deskriptif analisis sangat cocok untuk menjadi penelitian pembuka dari fenomena tersebut.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk menetapkan fokus dan prioritas utama dari penelitian ini, peneliti menerapkan batasan masalah yaitu tahun 2014 hingga 2023 atau di masa saat penelitian ini berlangsung. Periode ini dipilih dengan rasionalisasi bahwa tahun 2014 menjadi momentum utama Hongaria dalam menunjukkan sentimen anti-Uni Eropa, dan merupakan tahun di mana pernyataan Viktor Orbán terkait perubahan demokrasi illiberal Hongaria secara resmi disampaikan. Sentimen anti-Uni Eropa tersebut terus digaungkan hingga akhirnya pada tahun 2022 *Conditionality Mechanism* diberlakukan dengan pengajuan 17 *measures* sebagai syarat pemenuhan sanksi, dan adanya penetapan penangguhan hak

⁴⁸ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar, 2016).

Hongaria atas *EU Cohesion Fund* sebesar 6,3 Miliar Euro pada tanggal 12 Desember 2022 menjadi ujung dari batasan penelitian ini. Meskipun *Conditionality Mechanism* ditetapkan di tahun 2022, batasan penelitian ini diakhiri di tahun 2023 karena retorika Viktor Orbán mengenai *Conditionality Mechanism* masih dapat ditemukan dalam pidato dan siaran radio yang berlangsung hingga bulan Februari 2023.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisis merupakan objek yang hendak diteliti, diamati, dan diramalkan perilakunya, atau sering disebut sebagai variabel dependen⁴⁹. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah Hongaria dengan level analisis yaitu negara. Sementara unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis, atau disebut juga sebagai variabel independen. Pada penelitian ini yang menjadi unit eksplanasi adalah kebijakan *Conditionality Mechanism* Uni Eropa, sehingga pada penelitian ini level analisisnya adalah kelompok negara bangsa.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara data primer dengan data sekunder. *Primary data*; yakni mengambil dan menganalisis data yang didapatkan dari sumber utama, sementara *secondary data*; yaitu mengambil dan menganalisis data yang didapatkan dari data-data yang telah ada sebelumnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui observasi empiris, sementara pengumpulan data sekunder dijalankan

⁴⁹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (LP3ES, 1990).

melalui *library research*.

Observasi empiris peneliti lakukan dengan terjun langsung melihat situasi di lapangan, khususnya di kota Pecs dan Budapest. Melalui observasi empiris peneliti menemukan beberapa fenomena yang dapat dijadikan data penelitian seperti dokumentasi papan reklame kampanye anti-Uni Eropa, merasakan langsung situasi ekonomi Hongaria yang mengalami inflasi tinggi, dan melihat respon masyarakat dan para akademisi dalam memandang *Conditionality Mechanism* Uni Eropa dan prinsip demokrasi liberal. Contoh observasi empiris yang peneliti temukan dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bab kedua penelitian ini, dimana peneliti menemukan papan reklame yang digunakan sebagai *speech act* oleh pemerintah Hongaria terhadap sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia. Kemudian juga pada Gambar 2.5 dimana peneliti mendapatkan e-mail langsung dari rektor University of Pecs mengenai isu *Conditionality Mechanism* yang mana e-mail tersebut ditujukan untuk memberikan klarifikasi kepada mahasiswa yang takut terdampak oleh kebijakan tersebut.

Untuk data sekunder diambil melalui *library research*; seperti buku karya Jan-Werner Muller yang berjudul “*What is Populism*”, artikel jurnal yang berkaitan dengan *Conditionality Mechanism* Uni Eropa serta pemerintahan populis sayap-kanan Viktor Orbán, dan sentimen anti-Uni Eropa pemerintah Hongaria, pidato resmi Viktor Orbán yang diambil melalui laman resmi pemerintah Hongaria, berita daring yang diambil dari website terpercaya seperti Euronews, telex.hu, politico, dan HungaryToday, laman dari stasiun radio rutin di hari Jumat Viktor Orbán (*Jo Reggelt, Magyarorszag!*), akun Facebook Viktor

Orbán sebagai salah satu sumber pernyataan resmi pemerintah Hongaria, laporan analisis dari NGO lokal di Hongaria seperti Hungarian Helsinki Committee, K-Monitor, dan Transparency International Hungary, hingga dokumen-dokumen dan tayangan debat parlemen Uni Eropa yang dapat diakses di laman resmi setiap badan Uni Eropa, seperti consilium.europa.eu, eur-lex.europa.eu, dan lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan dijalankan dengan gambaran sebagai berikut; berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan reduksi data terhadap data yang dinilai cocok kemudian menganalisa dengan teori sekuritisasi melalui *speech act event*, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan atas analisis tersebut.

Analisa dimulai dengan mengumpulkan diskursus, retorika, dan pandangan pemerintah Hongaria terhadap Uni Eropa dan *Conditionality Mechanism* sebagai *existential threat* yang dapat ditemukan dalam pidato, pernyataan, dokumen resmi, dan media massa seperti papan reklame, siaran radio, sosial media Facebook dan sebagainya. Kemudian peneliti akan melakukan reduksi data dan pengelompokan data berdasarkan lima unit analisis utama dari teori sekuritisasi populisme oleh Bohdana Kurylo, yaitu *anti-elite*, *political outsider as a securitizing actor*, *agential audience*, *homogenous people as the referent object*, dan *identification between actor and the audience*.

Kemudian untuk menjabarkan lebih rinci bagaimana sekuritisasi dari Pemerintah Hongaria berhasil dijalankan, peneliti melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan dan mengaitkannya melalui tiga tahapan yang

digambarkan oleh Buzan, yaitu: *existential threats* sebagai tahap kemunculan isu, *emergency actions* sebagai langkah aksi untuk menangani isu, dan *breaking free of rules* sebagai efek dari relasi antar unit dimana pemerintah Hongaria sebagai *securitizing actor* telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat Hongaria sebagai *audience* sehingga mampu mengambil langkah yang melampaui aturan main seharusnya. Hingga diakhiri dengan pengambilan kesimpulan mengenai penjelasan bagaimana bentuk sekuritisasi Hongaria terhadap *Conditionality Mechanism* Uni Eropa.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran rinci dari struktur penting penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II SEJARAH HUBUNGAN UNI EROPA DAN HONGARIA

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai sejarah hubungan antara Uni Eropa dengan Hongaria dari masa *EU Accession* hingga diterapkannya kebijakan *Conditionality Mechanism*.

BAB III RETORIKA POPULIS SAYAP-KANAN HONGARIA DAN SENTIMEN ANTI-UNI EROPA

Bab ini menjelaskan secara rinci apa saja retorika pemerintah populis sayap-kanan Hongaria mengenai sentimen anti-Uni Eropa yang dapat ditemukan dalam berbagai sumber data primer dan sekunder untuk menggambarkan bagaimana sekuritisasi melalui *speech act*.

BAB IV ANALISIS SEKURITISASI HONGARIA TERHADAP

KEBIJAKAN CONDITIONALITY MECHANISM

Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang menjadi alasan Hongaria untuk tidak patuh terhadap *Conditionality Mechanism* Uni Eropa melalui teori sekuritisasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang mana mencakupi temuan-temuan penting dari penelitian ini.

